

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Teori

2.1.1.1 Teori Liberalisme

Dalam studi hubungan internasional terdiri dari berbagai teori besar, Teori pada tersebut digunakan sebagai dasar atau landasan dalam mempelajari studi hubungan internasional itu sendiri (Dugis, 2014). Salah satu teori besar dalam studi hubungan internasional adalah liberalisme. Sebagai teori terbesar kedua dalam studi hubungan internasional, liberalisme telah banyak memberikan pemikirannya dalam perkembangan hubungan internasional (Wardhani, 2014).

Terdapat beberapa pengertian tentang liberalisme. Pertama, liberalisme diartikan sebagai sebuah ideologi yang mana menjunjung tinggi kebebasan individu, disamping itu liberalisme juga diartikan sebagai sebuah teori dari pemerintah, yang berusaha untuk memberikan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tertentu (Dunne, 2001). Lebih lanjut lagi, Jackson and Sorensen (1999) menyatakan bahwa liberalisme adalah suatu perspektif yang memiliki pandangan positif tentang sifat manusia. Clark (1989) dalam Dunne (2001) mengatakan bahwa liberalisme dikenal sebagai paham optimisme. Sedangkan Wardhani (2014) dalam penjelasannya menyatakan bahwa liberalisme adalah perspektif dalam hubungan internasional yang berfokus pada permasalahan *international peace* dan *human rights*. Tokoh dari liberalisme ini antara lain Woodrow Wilson dan Norman Angell.

Liberalisme sebagai suatu perspektif berawal dari John Locke di abad ke tujuh belas yang melihat perkembangan negara-negara dalam menjamin kebebasan tiap individu (Jackson and Sorensen, 1999). Namun, apabila dipandang sebagai perspektif keilmuan, liberalisme baru muncul pada awal abad kedua puluh, sebagai adanya rasa trauma atas terjadinya perang dunia (Wardhani, 2014). Hoffman (1987) dalam Dunne (2001)

mengatakan bahwa esensi dari liberalisme adalah pengendalian diri, moderasi, kompromi dan perdamaian. Terdapat tiga asumsi dasar dari liberalisme antara lain yang pertama pandangan positif tentang sifat manusia, yang kedua keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, dan yang ketiga percaya terhadap kemajuan (Jackson and Sorensen, 1999).

Liberalisme sendiri memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan perspektif lain, yaitu yang pertama pandangan positif pada *human nature*. Kedua, percaya bahwa sejarah bisa dirubah dan mampu memberikan kemajuan dari sejarah. Ketiga, berfokus pada tatanan politik internasional maupaun politik domestik, yang artinya kaum liberal menganggap kedudukan politik internasional dan politik domestik adalah sama penting. Keempat, memiliki klaim bahwa ketergantungan ekonomi antar-negara akan dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya peperangan. Dan kelima menekankan pada efek positif dalam hubungan internasional (Wardhani, 2014).

Para kaum liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal melihat sistem internasional berkembang dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, namun mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional. Hal tersebut didasarkan pada pandangan liberal terhadap manusia dan masyarakat manusia, bahwa manusia adalah rasional, menempatkan kebebasan individu di atas segalanya, berpandangan positif terhadap karakteristik manusia, yakin terhadap kemajuan, dan menentang pembagian antara wilayah domestik dan internasional serta manusia memiliki kemampuan untuk membentuk organisasi internasional bagi keuntungan semua pihak (Jackson and Sorensen, 1999).

Dalam perspektif liberalisme, aktor dalam hubungan antarnegara

bukan hanya sebatas negara, namun liberalisme juga menganggap pentingnya keberadaan aktor lain seperti aktor non-negara dalam proses hubungan antarnegara. Tidak seperti realisme, Liberalisme mengedepankan proses kerjasama antar aktor dalam proses pemenuhan kebutuhan tiap negara. Liberal melihat bahwa pada dasarnya setiap negara dalam dunia internasional memiliki keterbatasan dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, oleh karenanya diperlukan aktor lain untuk proses menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh suatu negara. Liberalisme menganggap kerjasama merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antarnegara dan menganggap peperangan sebagai suatu hal yang tidak memiliki keuntungan (Wardhani, 2014).

Dalam hubungan internasional, liberalisme menganggap adanya integrasi regional, institusi multilateral, dan kerjasama dalam sistem anarki merupakan hal yang penting. Hal itu terjadi, karena menurut kaum liberal, kerjasama dalam sistem anarki dan integrasi regional dapat mencegah terjadinya peperangan antarnegara, karena ketika satu negara melakukan integrasi dan kerjasama dengan negara lain, maka negara-negara tersebut akan saling mengetahui karakteristik masing-masing negara dan tidak akan terjadi peperangan diantara keduanya. Hal ini diasumsikan dengan sifat manusia yang apabila terdapat dua manusia yang saling mengetahui karakteristik satu sama lain, maka akan sangat kecil kemungkinan kedua manusia tersebut untuk berkelahi (Wardhani, 2014).

Berdasarkan pandangan mengenai liberalisme oleh Jackson & Sorensen, Clark, dan Wardhani diatas dapat disimpulkan bahwa liberalisme lahir atas dasar pandangan positif tentang sifat manusia yang menjadi dasar bahwa hubungan internasional juga dapat bersifat kooperatif daripada konflikual, untuk itu asumsi liberalisme menjelaskan adanya sebuah kerjasama antar negara-negara atas dasar prinsip tersebut. Prinsip-prinsip itu seperti prinsip menjaga perdamaian dan kooperatif dan lainnya.

Liberalisme akan menyebabkan terjadi nya integrasi dan kerjasama. Menurut pandangan kaum liberal, kerjasama dalam sistem anarki dan

integrasi regional dapat mencegah terjadinya peperangan antarnegara, karena ketika satu negara melakukan integrasi dan kerjasama dengan negara lain, maka negara-negara tersebut akan saling mengetahui karakteristik masing-masing negara dan tidak akan terjadi peperangan diantara keduanya.

2.1.1.2 Konsep Diplomasi Pertahanan

Diplomasi Pertahanan adalah sebuah cara bagaimana mengelola hubungan internasional dua negara atau lebih dengan menggunakan kegiatan negosiasi yang dengan khusus mengkaji bidang pertahanan (Supriyatno, 2014). Tujuan utama dari diplomasi pertahanan adalah bagaimana mewujudkan cita-cita sebuah negara atau kepentingan nasionalnya. Sedangkan diplomasi pertahanan yang dikemukakan oleh Cottey dan Foster (2004) yaitu:

“the peacetime use of armed forces and related infrastructure (primarily defense ministries) as a tool of foreign and security policy and more specifically the use of military cooperation and assistance.”

Berdasarkan definisi Cottey dan Foster diatas, diplomasi pertahanan merupakan alat mencapai tujuan politik menggunakan instrument dan infrastruktur militer. Untuk itu, hal yang perlu digarisbawahi adalah diplomasi pertahanan merupakan alat dari kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan. Maka tujuan diplomasi pertahanan dapat dikatakan untuk mencapai tujuan luar negeri dan keamanan suatu negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan segala aspek yang dapat mendukungnya.

Dalam kasus ini, melalui DCA, Singapura mengadakan kerjasama pertahanan dengan Indonesia melalui *framework* diplomasi pertahanan yang dipandang sebagai suatu alat utama dalam kerjasama antar negara dengan tujuan membangun perdamaian, menguatkan rasa saling percaya, menghindari konflik, dan memperkuat kapabilitas masing-masing negara

menjadi agenda penting dalam pembentukan DCA antara Singapura dan Indonesia ini.

Defense Cooperation Agreement dibuat sebagai alat dalam mencapai kepentingan nasional tentunya baik Singapura maupun Indonesia yang sama-sama telah menyepakati dan menandatangani perjanjian tersebut. DCA dapat dikatakan sebagai instrumen Singapura dan Indonesia dalam merealisasikan kerjasama pertahanan bilateral antar negara.

Diplomasi pertahanan ditunjukkan dalam beberapa kegiatan. Menurut Cottey dan Forster (2004:7), kegiatan kegiatan tersebut meliputi:

- a. koneksi bilateral dan multilateral antara militer senior dan pegawai sipil di bidang pertahanan;
- b. penunjukkan atase pertahanan untuk negara lain;
- c. perjanjian kerja sama bilateral di bidang pertahanan;
- d. pelatihan militer dan personil sipil pertahanan dari negara lain;
- e. pembekalan keahlian dan saran di bidang kontrol diplomatik dari angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan teknik militer;
- f. koneksi dan pertukaran personel dan unit militer, serta kunjungan kapal;
- g. penempatan militer atau sipil dalam kementerian pertahanan atau lembaga militer negara mitra
- h. penyebaran tim pelatihan
- i. persediaan kelengkapan militer dan bantuan material lainnya; dan
- j. latihan militer secara bilateral dan multilateral yang bertujuan untuk pelatihan.

Contoh kegiatan diplomasi pertahanan yang dipaparkan Cottey dan Foster cenderung merupakan kegiatan diplomasi pertahanan tradisional yang masih berfokus pada penggunaan kekuatan militer. Namun, dalam beberapa hal diplomasi pertahanan telah mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ancaman. Rodon

Pedrason (2016) mendefinisikan diplomasi pertahanan secara lebih fleksibel dan sesuai dengan konsep ancaman dewasa ini, yaitu:

“all methods and strategies used by countries that may be in a state of competition with one another, but they have used a certain kind of practice including economic, culture, political cooperation, defence cooperation and diplomacy to make friends, hopefully cooperate with one another, and, most importantly, to build and increase mutual trust”

Menurut Pedrason (2016), Diplomasi Pertahanan tidak berfokus pada siapa yang melakukan kegiatan diplomasi, namun berfokus pada apa bentuk kegiatannya dan untuk tujuan apa diplomasi tersebut. Jika berada pada kegiatan sektor pertahanan atau bertujuan yang mendukung sektor pertahanan selama itu dalam kondisi damai, maka sebuah bentuk diplomasi akan dapat dikatakan sebagai diplomasi pertahanan. Maka dari itu dalam definisinya, Pedrason menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan di bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan lainnya dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dengan negara lain merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan.

Berdasarkan definisi Pedrason tersebut, dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan ancaman. Pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai diplomasi pertahanan tidak hanya berada pada tataran militer, tetapi setiap aspek diplomasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap negara lain, mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dalam konteks pertahanan merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan.

Penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Cottey bahwa beberapa aktivitas diplomasi pertahanan meliputi 10 aktivitas yang salah satunya merupakan salah satu bentuk dari DCA yaitu latihan bersama atau latihan militer secara bilateral. Dimana antara Indonesia dan Singapura berada pada masa damai yang tidak berkonflik satu sama lain

dengan menjalin kerjasama dibidang pertahanan dan menggunakan instrument militer sebagai alatnya. Hal ini lah yang menjadi alasan penelitian ini menggunakan konsep diplomasi pertahanan karena sesuai dengan isi dan tujuan dari DCA itu sendiri.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Andi Widjayanto menjelaskan mengenai varian utama dalam diplomasi pertahanan yaitu:

1. *Defense Diplomacy for Confidence Building Measures*
2. *Defense Diplomacy for Defense Capabilities*
3. *Defense Diplomacy for Defense Industry*

Diplomasi pertahanan melalui CBM dilakukan dalam beberapa cara seperti kerjasama militer yang merupakan simbol dari keinginan dalam menciptakan kerjasama, membangun persepsi kepentingan bersama, merubah pandangan militer dari negara lain, serta mendukung perbaikan pertahanan suatu negara (Acharya, 2001:66). Secara operasional diplomasi pertahanan CBM dilakukan melalui kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, pertukaran informasi strategis, pembatasan kapabilitas pertahanan, deklarasi kerjasama strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, serta latihan bersama (Cottey&Foster, 2006).

Diplomasi pertahanan untuk kapabilitas pertahanan dilakukan dalam rangka memperkuat kapabilitas pertahanan secara material seperti alutsista dan komponen pertahanan lain. Seperti melalui kerjasama strategis dalam hal bantuan militer, pembelian alutsista (kredit ekspor), pembangunan pangkalan militer, pemberian security umbrella yang dilakukan negara core ke negara *semi-phery* dan *periphery* maupun sebaliknya (Multazam,2010). Sedangkan Diplomasi pertahanan melalui industri pertahanan yaitu kerjasama strategis antar negara dalam produksi senjata, kerjasama dalam pengembangan dan penelitian senjata, pemberian lisensi, investasi dalam industri pertahanan, serta transfer teknologi (Hoyt, 2007:8).

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Defense Cooperation Agreement* merupakan salah satu bagian dari aktivitas diplomasi pertahanan sesuai

dengan . Hal ini dapat dilihat dari tujuan serta isi perjanjian tersebut baik untuk meningkatkan kapabilitas militer maupun membangun rasa saling percaya atau *confidence building measure*. Pada klausul latihan bersama, hal tersebut merupakan salah satu operasionalisasi diplomasi pertahanan dalam bentuk *confidence building measures*.

Diplomasi pertahanan dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik Singapura, Singapura yang memiliki kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara, demi memperkuat kekuatan militer dan kapabilitas pasukannya menggunakan instrumen diplomasi pertahanan demi mewujudkan kepentingan nasionalnya tersebut. Dalam hal ini penulis juga menggunakan pemikiran idiil syawfi bahwa varian-varian diplomasi pertahanan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Singapura untuk mengadakan kerjasama pertahanan dengan Indonesia.

Singapura melihat peluang besar untuk menguatkan kapabilitas militernya bersama Indonesia dengan mengadakan berbagai kerjasama pertahanan termasuk dengan latihan militer bersama. Singapura yang merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar di ASEAN tentunya akan membuat suatu manuver untuk merealisasikan setiap kepentingan nasionalnya termasuk pada bidang pertahanan. Disisi lain, melalui upaya-upaya yang dilakukan Singapura untuk merealisasikan DCA ini merupakan langkah nyata bagi Singapura untuk mewujudkan kerjasama pertahanan yang lebih komprehensif dengan Indonesia.

Definisi mengenai Diplomasi pertahanan menurut Pedrason, Cottey & Foster diatas dapat ditarik variabel-variabel yang membangun konsep diplomasi pertahanan tersebut, yaitu: (1) diplomasi, (2) kepentingan nasional, (3) penggunaan instrument militer, (4) pada masa damai, dan (5) mantan musuh atau potensial musuh. Kelima variabel tersebut merupakan konsep penting pembentuk diplomasi pertahanan sehingga tercapainya sebuah aktivitas dan kegiatan diplomasi pertahanan tersebut dapat dilihat dari variabel pembangun ini. Setelah itu juga dapat dikatakan apakah sebuah diplomasi pertahanan dapat dikatakan berhasil atau sebaliknya.

Dengan demikian, diplomasi pertahanan dapat dikatakan berhasil jika negara satu atau lebih dapat mencapai berbagai variabel seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Diplomasi

Aspek diplomasi dalam kasus ini merupakan upaya Singapura untuk merealisasikan pembentukan DCA dengan Indonesia yang dimulai tahun 2007 ketika Indonesia tidak meratifikasi perjanjian hingga tahun tahun berikutnya. Aspek diplomasi dalam kasus ini dinilai penting, karena menyangkut kepentingan nasional yang hendak dicapai setiap negara yang bekerjasama. Diplomasi Indonesia dalam kasus DCA ini ialah dengan tetap menjaga kepentingan nasionalnya untuk tetap tidak meratifikasi walaupun telah ada upaya-upaya untuk mengubah klausul.

2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menjadi tujuan utama dalam pembentukan kerjasama khususnya dalam perjanjian DCA. Dalam perjanjian DCA terdapat dua negara yang terlibat yaitu antara Indonesia dan Singapura. Dua negara tersebut tentunya ingin mencapai kepentingan politik negara masing-masing melalui DCA ini. akan tetapi, ketika perjanjian telah ditanda-tangani dan disetujui masing-masing negara, proses pengesahan di parlemen salah satu negara mengalami penolakan sehingga terjadi perbedaan pandangan dalam memaknai kepentingan nasional dari perjanjian ini. Singapura berdasarkan asas keuntungan sedangkan Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara.

3. Penggunaan Instrument Pertahanan

Dalam perjanjian ini fokus utama nya ialah latihan bersama, dimana merupakan salah satu aktivitas dan tujuan dari diplomasi pertahanan itu sendiri.

4. Masa Damai

Pembentukan kerjasama DCA ini dibentuk bukan dalam konflik antara Indonesia dan Singapura. Kedua negara telah menjalin hubungan yang baik sejak kemerdekaan Singapura tahun 1970-an sehingga

kerjasama pertahanan yang komprehensif dalam bentuk DCA ini dibentuk atas dasar saling percaya antar negara.

5. Mantan musuh atau musuh potensial

Diplomasi pertahanan ditujukan tidak hanya untuk negara sahabat, akan tetapi negara yang menjadi musuh dahulunya dan juga negara yang bisa jadi musuh kedepannya. Dalam kasus ini Indonesia dan Singapura tidak dapat dikatakan musuh satu sama lain karena kedua negara tidak pernah terlibat konflik terbuka secara langsung. Pandangan mengenai musuh potensial baik Indonesia maupun Singapura bisa jadi menjadi faktor mengapa diplomasi pertahanan melalui DCA ini tidak berhasil diterapkan.

2.1.1.3 Konsep Diplomasi Bilateral

Praktik diplomasi merupakan suatu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain dan demi mewujudkan suatu kepentingan negara. Seperti apa yang telah disinggung dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, diplomasi merupakan unsur pendukung dalam mewujudkan kepentingan negara. Praktik diplomasi yang dilakukan oleh masing-masing aktor juga tentunya berbeda-beda antara satu aktor dengan aktor yang lainnya. Perbedaan ini disesuaikan dengan aktor serta tujuan dari diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut.

Diplomasi secara umum dan klasik selalu dikaitkan dengan perang, pada awalnya diplomasi dianggap sebagai kegiatan kenegaraan dan bahkan lebih spesifik lagi yaitu kemiliteran yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perang (Supriyatno, 2014). Hal ini sejalan dengan pemikiran Clausewitz bahwa “diplomasi merupakan kelanjutan dari perang dengan menggunakan sarana yang lain” (Roy, 1991, Hal. 4). Namun, semakin berkembangnya dinamika dalam hubungan internasional maka semakin banyak definisi yang lebih luas daripada perang dan mencakup kerjasama. Menurut Olton, Diplomasi merupakan sebuah cara atau taktik dari kebijakan luar negeri yang

digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingannya (Emilia, 2013, Hal. 5).

Meskipun ukuran dalam keberhasilan dari sebuah diplomasi tidak jelas dan akurat, Sir Earnest Satow memberikan karakterisasi diplomasi yang baik, yaitu diplomasi tergantung pada penerapan kemampuan (kepandaian) dan melakukan taktik terhadap hubungan resmi antar pemerintah dari negara yang berdaulat (Murray, 2008).

Menurut Harold Nicholson, salah satu penteoris diplomasi tradisional, menyatakan bahwa diplomasi berhubungan atau setidaknya terdiri dari lima hal, yaitu: Politik luar negeri, negosiasi, suatu bentuk dinas dalam konteks luar negeri, mekanisme pelaksanaan negosiasi, dan penilaian yang bersifat abstrak, yaitu dalam arti yang positif mencangkup keahlian negosiasi dalam tingkat internasional sedangkan dalam arti negatif mencangkup tindakan yang lebih licik (Roy, 1991).

Menurut KM Panikkar, diplomasi merupakan seni dalam mencapai kepentingan negaranya yang berada dalam lingkup hubungan internasional (Roy, 1991). Sementara itu Bantarto Bandoro (2005) menyatakan bahwa diplomasi merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri suatu negara yang bertujuan memperjuangkan kepentingan nasional dan sekaligus memelihara hubungan baik antar-negara dengan pelaksanaan atau perundingan kebijakan luar negeri.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diplomasi dapat dikatakan sebagai kegiatan ketika masa damai yang dilakukan suatu negara terkait suatu isu dengan melalui aspek-aspek yang dimiliki negara tersebut dengan tujuan mengedepankan kepentingan nasionalnya dalam lingkup hubungan internasional.

Menurut Barston (2013), terdapat beberapa pola dari diplomasi ini, antara lain diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, diplomasi asosiasi, diplomasi konferensi, diplomasi personal, dan yang terakhir adalah diplomasi puncak.

Menurut Djelantik (2008) juga diplomasi bilateral merupakan suatu bentuk hubungan politik dan budaya yang hanya melibatkan dua negara. Pola diplomasi ini juga cenderung bersifat tertutup atau khusus. Bentuk dari pola ini adalah membuat kesepakatan atas suatu perjanjian kerjasama dan ada pula pertukaran perwakilan negara (Morgenthau, 1985).

Pola ini sebenarnya bukan merupakan suatu pola yang baru digunakan, bahkan mungkin pada era modern ini, pola bilateral ini sudah jarang digunakan. Pola ini sudah digunakan semenjak zaman sebelum Perang Dunia I, bahkan pada saat peradaban kuno, hingga berakhirnya Perang Dunia I. Hadirnya Liga Bangsa Bangsa menjadi pertanda mulai menurunnya penggunaan pola diplomasi bilateral ini (Freeman, 1994).

Kelebihan dari penggunaan diplomasi bilateral adalah masing-masing negara yang berdiplomasi akan lebih fokus dalam mengurus kepentingan dan bernegosiasi karena hanya melibatkan dua negara. Bilateralisme atau diplomasi bilateral mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara (Berridge, 2002:132). Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi Kedutaan Besar tidak bisa dipertahankan.

Terkait dengan kasus penelitian ini, antara Indonesia dan Singapura telah menggunakan cara diplomasi bilateral untuk mencapai kepentingan nasional kedua negara tersebut. Terkait dengan kerjasama pertahanan, Singapura juga membuat kesepakatan dengan Indonesia dalam *Defense Cooperation Agreement* yang disetujui kedua negara pada tahun 2007.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada penelitian penelitian sebelumnya. Penelitian pertama, Jurnal Penelitian dari Muhammad Kafrawy (2014), di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Kepentingan Singapura dalam Kerjasama Pertahanan terhadap Indonesia”. Penelitian Kafrawy menganalisis apa motivasi Singapura dalam mengajukan kerjasama pertahanan dengan Indonesia melalui DCA. Penelitian ini berfokus pada

sejarah hubungan bilateral Indonesia, kerjasama keamanan antar negara, dan menjelaskan situasi geografi, topografi, serta demografinya. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang menunjukkan hasil penelitian Kafrawy akan menjelaskan fakta-fakta yang menguntungkan Singapura seperti latihan bersama di negara lain akan menjaga ekosistem laut negaranya. Penelitian Kafrawy juga tidak mengkaitkan unsur-unsur Diplomasi pertahanan sebagai pondasi utama dalam kepentingan Singapura sehingga analisa kepentingan belum begitu tajam. Penelitian ini berangkat dari hasil penelitian kafrawy dimana kepentingan Singapura yang dijelaskan penelitian tersebut belum cukup kuat untuk menjelaskan kepentingan nasional Singapura yang sebenarnya.

Penelitian kedua, dari Tesis Rodi Suprasodjo (2012), yang berjudul “perjanjian kerjasama pertahanan (DCA) antara Pemerintah Indonesia dan Singapura”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara Indonesia-Singapura banyak merugikan kepentingan Pemerintah Indonesia dan selanjutnya diusulkan untuk direvisi dengan menambah pasal-pasal baru dalam Aturan pelaksanaan serta memisahkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperations Agreement) dengan Perjanjian Ekstradisi. Penelitian ini tidak menjelaskan faktor yang harus disadari bagi setiap pembuat kebijakan di Indonesia dalam perjanjian dan kerjasama antar negara. Untuk itu, penelitian ini bersifat fenomenologis yang tidak menganalisis bagaimana kelanjutan dari kerjasama ini kedepan.

Penelitian ketiga, dari Jurnal penelitian Angguntari C. Sari, Mira Permatasari, dan Idil Syawfi (2013) yang berjudul, “pembahasan Defense Cooperation Agreement Indonesia-Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi teori Birokratik politik”. Penelitian Angguntari, dkk ini menganalisis pembahasan internal mengenai DCA antara DPR RI dan pemerintah eksekutif yang menggunakan teori birokrasi politik. Hasil gagal nya ratifikasi DCA ini kemudian dijelaskan melalui teori birokrasi politik ini. Untung dan rugi Indonesia terkait

kegagalan ratifikasi oleh DPR RI. Keuntungannya, dari tulisan ini akan membantu menjelaskan kerugian Indonesia jika meratifikasi DCA yang diukur sesuai dengan kepentingan nasional Singapura yang tentunya bersinggungan dengan kepentingan Indonesia.

Berikut rangkuman penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

	Muhammad Kafrawy (2014)	Rodi Suprasodjo (2012)	Angguntari C.,Mira Permatasari, Idil Syawfi (2013)	Jana Milia
Judul	Jurnal: <i>Kepentingan Singapura dalam Kerjasama Pertahanan Terhadap Indonesia</i>	Tesis: <i>Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) antara Pemerintah Indonesia dan Singapura”</i>	Jurnal: <i>Pembahasan DCA oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi teori Politik Birokratik</i>	Diplomasi Pertahanan Singapura Terhadap Indonesia Melalui <i>Defense Cooperation Agreement</i> Tahun 2007 – 2017
Rumusan Masalah	Kepentingan-kepentingan Singapura dalam rangka membangun kerjasama pertahanan dengan Indonesia yang ditinjau dari kerjasama DCA	Bagaimana jalannya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura khususnya DCA dan posisi Indonesia yang tidak menguntungkan dalam perjanjian tersebut	Bagaimana konstelasi politik dalam negeri khususnya dari DPR dan Pemerintah RI yang pada akhirnya tidak meratifikasi DCA	Indonesia dan Singapura melalui kerjasama pertahanan yang fluktuatif khususnya DCA, Indonesia yang pada akhirnya menolak ratifikasi DCA kemudian disusul upaya-upaya Singapura untuk merealisasikan DCA tersebut. Disamping kepentingan geografi apa kepentingan Singapura sebenarnya
Ruang Lingkup	Penelitian ini berfokus pada sejarah hubungan bilateral antar negara Indonesia dan Singapura, kerjasama pertahanan dan keamanan dan menjelaskan situasi Geografi , Topografi, dan Demografi	Penelitian ini menjelaskan sejarah serta jalannya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura melalui DCA ini serta penelitian ini melihat dari sisi Indonesia yang dirugikan melalui DCA	pada penelitian ini membahas sisi untung dan rugi Indonesia terkait kegagalan ratifikasi oleh DPR RI.	Analisa diplomasi pertahanan Singapura terhadap Indonesia melalui DCA pada tahun 2007 – 2017 yang belum tercapai
Teori	Konsep Geopolitik dan Geostrategis	Teori Kebijakan luar negeri	Teori Politik Birokratik	Teori liberalisme, konsep diplomasi pertahanan, dan diplomasi bilateral

Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Kelemahan	Penelitian ini hanya membahas kepentingan geografi yang menjadi kelemahan Singapura (kasat mata) akan tetapi jika dianalisa lebih tajam dengan menggunakan teori dan konsep dibidang pertahanan maka terdapat jawaban lainnya	Penelitian ini bersifat factual dari kasus tersebut dan normative, tidak menjelaskan kebenaran ilmiah yang harus disadari bagi setiap pembuat kebijakan di Indonesia. dan juga tidak menganalisis bagaimana kelanjutan dari kerjasama ini kedepan	Penelitian ini melihat dari sisi Indonesia	
Teori	Konsep Geopolitik dan Geostrategis	Teori Kebijakan luar negeri	Teori Politik Birokratik	Teori liberalisme, konsep diplomasi pertahanan, dan diplomasi bilateral
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Kelemahan	Penelitian ini hanya membahas kepentingan geografi yang menjadi kelemahan Singapura (kasat mata) akan tetapi jika dianalisa lebih tajam dengan menggunakan teori dan konsep dibidang pertahanan maka terdapat jawaban lainnya	Penelitian ini bersifat factual dari kasus tersebut dan normative, tidak menjelaskan kebenaran ilmiah yang harus disadari bagi setiap pembuat kebijakan di Indonesia. dan juga tidak menganalisis bagaimana kelanjutan dari kerjasama ini kedepan	Penelitian ini melihat dari sisi Indonesia	

Tabel 2.1 Pemikiran Terdahulu

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

